

**PENTINGNYA STRATEGI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 1
BANYUKE HULU)**

Julia Larasanti¹, Luhur Wicaksono², Urai Salam³

^{1,2,3}Magister Administrasi Pendidikan, FKIP, Universitas Tanjungpura
¹F2171231006@student.untan.ac.id, ²luhur.wicaksono@fkip.untan.ac.id ,
³urai.salam@untan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the financial management strategies implemented in schools to improve the quality of education and what activities are prioritized to be funded to improve the quality of education at SMA Negeri 1 Banyuke Hulu. The form of this research is qualitative research using case studies. Seven research participants consisting of the principal, deputy head of curriculum, treasurer, teachers, administration, school committee and school supervisor are the main data sources in this study. Data collection was done through interview, observation, documentation and focused discussion. Data analysis used qualitative descriptive method. The main findings of the analysis show that To improve the quality of education in SMA Negeri 1 Banyuke Hulu, a strategy for planning, implementing and evaluating education funding based on the principle of accountability is needed; Priority activities in SMA Negeri 1 Banyuke Hulu are developing teacher competence through training, improving infrastructure or educational facilities, and infrastructure and extracurricular scouting because it can help shape students' character, skills and spirituality; Based on the results of the research, the obstacle of the school is that it cannot collect, on the other hand, the funds owned are limited, which causes difficulties in developing school programs, while many programs must be financed with the funds owned by the school. This means that schools have to find other sources of funding for activities that are not included in the RKAS budget. The conclusion of this research is that SMA Negeri 1 Banyuke Hulu has shown a good financial management strategy to improve the quality of education. The implication of this research is that there is a need for continuous evaluation to ensure that prioritized activities can be carried out properly and can have an impact on improving the quality of education.

Keywords: management, quality, financial, education, strategy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi manajemen pembiayaan yang diterapkan di sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kegiatan yang menjadi prioritas yang dibiayai untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu. Bentuk penelitian adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Partisipan penelitian berjumlah 7 orang yaitu Kepala sekolah, wakil kepala

kurikulum, bendahara, guru, tata usaha, komite sekolah dan pengawas sekolah merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan diskusi terfokus. Analisis data yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif. Temuan utama dari hasil analisis menunjukkan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu diperlukan strategi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan pendidikan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas; Kegiatan yang menjadi prioritas di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu adalah pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan, peningkatan infrastruktur atau sarana dan prasarana pendidikan dan ekstrakurikuler pramuka, karena dapat membantu membentuk karakter, keterampilan, dan mental spiritual siswa; Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi hambatan sekolah adalah tidak dapat melakukan pungutan, di sisi lain dana yang dimiliki hanya terbatas sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengembangan program sekolah sedangkan banyak program yang harus dibiayai dengan dana yang dimiliki sekolah. Sehingga sekolah perlu mencari pendanaan lain untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam RKAS. Kesimpulan dari penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Banyuke Hulu telah menunjukkan strategi manajemen pembiayaan yang baik guna meningkatkan mutu pendidikan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlu adanya evaluasi secara berlanjut untuk memastikan kegiatan yang menjadi prioritas dapat terlaksana dengan baik dan dapat berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Kata Kunci: manajemen, mutu, pembiayaan, pendidikan, strategi

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global. Kualitas pendidikan yang baik tidak hanya ditentukan oleh kualitas kurikulum dan tenaga pendidik, tetapi juga oleh bagaimana sumber daya yang tersedia, khususnya pembiayaan, dikelola. Dalam konteks ini, manajemen pembiayaan yang efektif menjadi kunci penting dalam meningkatkan mutu pendidikan.

SMA Negeri 1 Banyuke Hulu, sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah, dihadapkan pada tantangan yang serupa dengan sekolah-sekolah lain di Indonesia, yaitu bagaimana mengelola anggaran yang terbatas untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Pembiayaan pendidikan yang dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa baik dari segi akademik maupun non-akademik.

Namun, banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan dana dan sumber daya, sehingga penting bagi mereka untuk memiliki strategi manajemen pembiayaan yang efektif.

Sebagai sebuah institusi pendidikan, SMA Negeri 1 Banyuke Hulu memerlukan strategi yang tepat dalam mengelola anggaran yang ada agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada para siswa. Dalam hal ini, manajemen pembiayaan yang tidak hanya berfokus pada aspek efisiensi, tetapi juga pada efektivitas penggunaan dana, akan sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas pembelajaran dan fasilitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut.

Melalui penelitian ini, akan dibahas mengenai pentingnya strategi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan strategi tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan yang dihasilkan, serta mengungkap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengelola pembiayaan pendidikan di sekolah ini. Dengan demikian,

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pihak sekolah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih baik untuk masa depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disajikan dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam lembaga pendidikan yang dimaksud pada saat penelitian sedang berlangsung.

Adapun data penelitian diperoleh dengan cara melakukan observasi, wawancara dengan pengguna anggaran dan dokumentasi kegiatan sekolah yang terkait dengan pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uraian hasil penelitian yang diperoleh merupakan penjabaran secara deskriptif terhadap rumusan permasalahan seperti disebutkan pada diatas, yang terdiri dari:

1. Strategi manajemen pembiayaan yang diterapkan di sekolah untuk

meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi manajemen pembiayaan yang diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu, terdapat sejumlah pendekatan yang digunakan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Agar mencapai tujuan yang optimal, perencanaan menjadi langkah penting untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Anggaran sekolah tersebut tercermin dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang berkaitan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

RKAS disusun melalui musyawarah kerja kepala sekolah yang diadakan sebelum tahun ajaran baru dimulai, melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif. Menurut Yusuf (2023) Pengelolaan pembiayaan pendidikan dapat dipahami sebagai manajemen pembiayaan, yang meliputi tiga fungsi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pelaksanaan pembiayaan di sekolah tersebut mengadopsi prinsip akuntabilitas publik, di mana pengembangan program kegiatan pendidikan ditangani oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki loyalitas, integritas, serta kemampuan kepemimpinan yang baik. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran dalam program kegiatan pendidikan, dibutuhkan laporan berupa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang disampaikan melalui aplikasi online ARKAS, di mana belanja aset sekolah dilakukan dengan menggunakan sistem siplah.

Agar pembiayaan pendidikan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi dan misi sekolah, sangat penting untuk melakukan evaluasi pembiayaan melalui evaluasi program yang dilakukan setiap semester. Pelaporan pembiayaan pendidikan adalah kewajiban lembaga pendidikan untuk mengelola keuangan unit atau satuan pendidikan secara tertib, tunduk pada peraturan perundang-undangan, serta efisien, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa kepatutan dan keadilan.

Evaluasi pembiayaan pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan menilai hasil dari

rencana yang telah ditetapkan. Proses ini juga memberikan imbalan kepada staf berdasarkan kinerja yang ditunjukkan, sambil merancang dan merencanakan kembali penyesuaian terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki.

Dalam konteks administrasi, evaluasi berarti kegiatan yang mengukur tingkat efektivitas kerja individu serta efisiensi penggunaan metode dan alat bantu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu, evaluasi dilakukan dengan mengamati keberhasilan program kegiatan serta pengembangan program yang telah dilaksanakan.

Keberhasilan dari program kegiatan yang dikelola oleh SDM yang telah diberdayakan oleh pihak sekolah melalui musyawarah akan diberi penghargaan berupa insentif tambahan, dan mereka akan dilibatkan dalam program pengembangan lainnya.

Biaya pendidikan, seperti yang diungkapkan oleh Supriyadi (2003), merupakan salah satu komponen penting dalam Hasil-tal (Hasil-tal-input) yang berperan krusial dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam konteks ini, biaya mencakup berbagai jenis pengeluaran

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang, maupun tenaga kerja.

Menurut Nanang Fattah (2014), biaya pendidikan mencakup sejumlah dana yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini termasuk gaji guru, peningkatan profesionalisme, penyediaan peralatan dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan ekstrakurikuler, pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu bentuk sumber daya, baik berupa uang, tenaga, maupun barang yang secara langsung dapat mendukung efektivitas dan penerapan manajemen pendidikan (Sudarmono dkk., 2021).

Pendanaan pendidikan nasional diatur dalam bagian khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada Bab XIII, Pasal 46 hingga 49. Dalam bab ini dijelaskan mengenai tanggung jawab pendanaan (Pasal 46), sumber pendanaan (Pasal 47), pengelolaan dana pendidikan (Pasal 48), dan

pengalokasian dana pendidikan (Pasal 49). Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah (pusat), Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), serta masyarakat (Pasal 46 ayat 1). Dalam konteks ini, masyarakat diartikan sebagai kelompok warga negara Indonesia yang non-pemerintah dan memiliki perhatian serta peran dalam bidang pendidikan.

Perlu dicatat bahwa masyarakat harus dibedakan dari orang tua peserta didik atau peserta didik itu sendiri (Pasal 1 butir 7, 28, 29, 44, dan 46) (Tamam, 2018). Temuan penelitian di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu menunjukkan bahwa anggaran pemerintah direalisasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang mencakup delapan Standar Nasional Pendidikan. Pendanaan di sekolah tersebut bersumber dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) dari pemerintah. Dari uraian tersebut, dapat kita lihat bahwa pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sumber pendanaan pendidikan seharusnya ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan

keberlanjutan. Namun, keterbatasan dana yang berasal dari pemerintah mendorong sekolah untuk mencari sumber pendanaan tambahan dari wali siswa atau masyarakat demi meningkatkan pelayanan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 ayat 1, di mana masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan melalui perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat seharusnya mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan di atas, peningkatan mutu pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh sumber biaya pendidikan. Temuan penelitian ini sejalan dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 46 ayat 1, 2, dan 3 serta Pasal 47 ayat 1, 2, dan 3.

Seharusnya, dana pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD harus ditingkatkan sesuai dengan

amanat Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 49 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang mensyaratkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Peningkatan dana pendidikan, sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan UU Sisdiknas, serta efisiensi dalam penggunaan dana pendidikan menjadi alternatif strategis untuk merealisasikan konsep pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat (Tamam, 2018).

2. Kegiatan yang menjadi prioritas yang dibiayai untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu

Berdasarkan hasil observasi serta hasil penelitian terkait dengan kegiatan yang menjadi prioritas yang dibiayai dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu yakni kegiatan:

- a. Pengembangan profesi guru melalui pelatihan;
- b. Peningkatan karakter dan keterampilan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka;
- c. Peningkatan Infrastruktur atau Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Keberadaan serta kualitas sarana dan prasarana akan berpengaruh terhadap jalannya proses belajar

mengajar dan prestasi belajar siswa. Sarana dan prasarana merupakan hal yang tidak boleh diabaikan karena digunakan untuk mempermudah pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan.

Dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tepat dalam program kegiatan belajar mengajar menjadi efektif dan efisien sehingga dapat berpengaruh pada proses pembelajaran siswa.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati dalam pengadaan sarana dan prasarana di SMAN 1 Banyuke Hulu selalu berfokus pada perencanaan sebelumnya yang telah disepakati bersama. Pada proses pengadaan wakil kepala sarana dan prasarana selalu berkoordinasi kepala sekolah dan tim perencana pengadaan barang guna untuk menjalin kerja sama yang baik.

Semisal pada pembelian barang atau unit tertentu semua itu harus diketahui oleh kepala sekolah dan wakil kepala sarana dan prasarana. Tim perencana pengadaan barang juga menganalisis usulan-usulan dalam pengadaan barang untuk disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan apa yang sedang dibutuhkan oleh siswa sehingga ini

akan meminimalisir pengadaan barang yang tidak perlu dan juga ini dalam pengadaan barang disesuaikan dengan anggaran sekolah.

Kemudian dalam pengadaan sarana prasarana harus menganut pada prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa. Pengadaan sarana prasarana di SMAN 1 Banyuke Hulu dilakukan berdasarkan beberapa prinsip. Seperti prinsip efisiensi dimana pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan yang ditetapkan dana dan daya yang terbatas.

Kemudian prinsip efektif dimana pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-sebesarannya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Kemudian prinsip terbuka dan bersaing dimana pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa untuk menawarkan penawaran terbaiknya.

Hal ini telah sesuai dengan observasi yang dimiliki oleh peneliti bahwa prinsip efisiensi, efektif, dan prinsip terbuka dan bersaing dilakukan dalam pengadaan sarana prasarana SMAN 1 Banyuke. Pengadaan sarana prasarana di

SMAN 1 Banyuke Hulu dilaksanakan melalui beberapa langkah.

Selain itu, beberapa hal lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah: Mengadopsi filosofis mutu, Secara terus-menerus melakukan usaha-usaha perbaikan mutu, Melibatkan semua orang yang bersangkutan dengan pendidikan, Memanfaatkan sumber daya belajar yang beragam, Mengoptimalkan penggunaan teknologi pendidikan.

3. Hambatan yang dihadapi manajemen pembiayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi hambatan manajemen pembiayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu yakni:

a. Kurangnya Sumber Pendanaan Alternatif

Salah satu hambatan utama yang dihadapi manajemen pembiayaan di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu adalah keterbatasan sumber pendanaan alternatif di luar dana pemerintah. Sekolah ini sangat bergantung pada dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan alokasi dari pemerintah daerah, yang

sering kali belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pengembangan sekolah, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Minimnya sumber pendanaan tambahan seperti kerja sama dengan pihak swasta, donasi, atau program CSR (Corporate Social Responsibility) membuat sekolah kesulitan menyediakan fasilitas belajar yang lebih baik, pelatihan guru yang berkualitas, serta program ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan potensi siswa.

Keterbatasan ini berujung pada lambatnya inovasi pembelajaran, kurangnya pemanfaatan teknologi modern, dan sulitnya mendanai kegiatan pengembangan kompetensi siswa di berbagai bidang. Oleh karena itu, mencari dan mengelola sumber pendanaan alternatif menjadi hambatan krusial yang harus diatasi agar mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu dapat meningkat secara signifikan.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk

meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu diperlukan strategi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan pendidikan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah digunakan untuk meningkatkan mutu outcome, output, dan input. Perencanaan pembiayaan di SMA Negeri 1 Banyuke hulu dituangkan ke dalam RAPBS dan RKAS BOS, yang disusun sebelum tahun anggaran baru dimulai. Pelaksanaan manajemen pembiayaan disekolah tersebut menggunakan sistem online dengan aplikasi ARKAS. Sedangkan Evaluasi yang dilakukan sekolah adalah dengan melihat keberhasilan suatu program kegiatan dan pengembangan program.

Kegiatan yang menjadi prioritas yang dibiayai dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu yakni kegiatan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengembangan sarana dan prasarana dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka.

Hambatan dalam manajemen pembiayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1

Banyuke Hulu yakni antara lain ketersediaan dan kecukupan anggaran merupakan faktor utama yang mendukung berjalannya kegiatan peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu. Kegiatan prioritas menjadi hal penting yang harus dimiliki apabila ingin kegiatan peningkatan mutu pendidikan tercapai secara memuaskan semua pihak baik orang tua siswa sebagai pelanggan pendidikan dan siswa sebagai peserta didik serta seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Banyuke Hulu.

Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang transparan, ketiga prioritas tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fattah, N. (2014). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pub. L. No. 59 (2021).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi No. 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Pub. L. No. 32 (2022).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Pub. L. No. 48 (2008). Nanang Fattah
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2021). *Pembiayaan Pendidikan*. 2(1). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1>
- Supriyadi. (2003). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tamam, B. (2018). *Reorientasi Pendanaan Pendidikan Dalam Membangun Mutu Sekolah*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003).
- Yusuf, M. (2023). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara)*. Dalam *JMP-DMT* (Vol. 4, Nomor 1).